

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dunia bisnis kini diwarnai dengan keberadaan *family business* dengan keberadaannya yang cukup banyak memiliki andil yang cukup signifikan bagi pendapatan negara. *Family - owned* dan *family - controlled firms* tercatat sebanyak 90 persen dari semua bisnis yang didirikan di Amerika Serikat, di mana sekitar 17 juta perusahaan keluarga (termasuk *sole proprietorships*) beroperasi, bahkan *family business* berkontribusi sebanyak 64 persen dari produk domestik bruto Amerika Serikat (Poza, 2009). Di Australia, Smyrnios dan Romano (1999) mengatakan bahwa bisnis keluarga membentuk 83% dari sektor perusahaan swasta dan mempekerjakan lebih dari 50% dari angkatan kerja. *Family business* merupakan sumber penting bagi penciptaan kekayaan pribadi di Asia dan juga merupakan pilar penting bagi perekonomian regional (Iskandar, 2011). Perekonomian di Asia Tenggara, China, dan India termasuk pesat dengan angka pertumbuhan ekonomi pada periode 2000-2007 yang mencapai kisaran 8,6% (Intana, 2013). Hal itu tak terlepas dari peran adanya perusahaan keluarga yang mendorong pertumbuhan ekonomi di masing – masing negara. Berikut ini merupakan daftar 10 keluarga terkaya di Asia dengan masing – masing bisnisnya.

No.	Nama Keluarga	Negara	Bisnis	Perkiraan Kekayaan
1.	Keluarga Ambani	India	Reliance Industries dan Reliance Group	US\$37,6 miliar
2.	Li Ka-shing dan Keluarga	Hong Kong	Cheung Kong, PCCW, Hutchison Whampoa	US\$32 miliar
3.	Lakshmi Narayan Mittal dan Keluarga	India	Ancelor Mittal	US\$28 miliar
4.	Keluarga Kwok	Hong Kong	Sun Hung Kai Properties	US\$22 miliar
5.	Sunnil Mittal dan keluarga	India	Bharti Group	US\$16,5 miliar

6.	Keluarga Kuok	Malaysia, Singapura	Kuok Group	US\$16,1 miliar
7.	Keluarga Lee Kun Hee	Korea Selatan	Samsung Group	US\$11,6 miliar
8.	Keluarga Hartono	Indonesia	Kelompok usaha Djarum	US\$11 miliar
9.	Keluarga Ng	Singapura	Far East Organization, Sino Group	US\$8,9 miliar
10.	Keluarga Wang	Taiwan	Formosa Plastics Group	US\$8,6 miliar

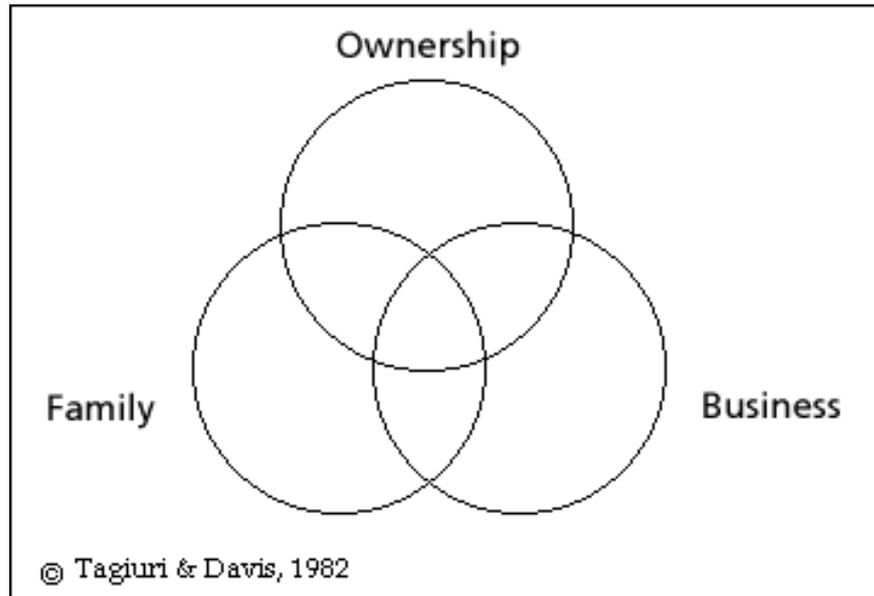
Tabel 1.1. Daftar 10 Keluarga Terkaya di Asia

Sumber: *bisnis.news.viva.co.id*

Di Indonesia sendiri, perusahaan keluarga mampu memberi sumbangan antara 45% sampai 70% dari Produk Domestik Kotor (GDP) dan banyak menyerap tenaga kerja di banyak negara (Glassop dan Waddell, 2005). Berdasarkan data internal The Jakarta Consulting Group (Susanto, 2006) menunjukkan 88 persen perusahaan swasta nasional Indonesia merupakan perusahaan keluarga.

Menurut Chua, Chrisma dan Sharma (1999) *family business* adalah bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga inti. Selain itu, menurut Poza (2009), perusahaan dinyatakan sebagai bisnis keluarga ketika seorang pengusaha atau CEO penerusnya dan satu atau lebih anggota keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan.

Davis (2001) mengemukakan bahwa dunia perusahaan keluarga menghasilkan bauran dari bisnis, keluarga, dan kepemilikan yang dapat menyebabkan kesulitan untuk perencanaan dan penyelesaian masalah akibat tumpang tindih antara ketiga kelompok sering menyebabkan sudut pandang yang berbeda antara individu bergantung pada lokasi mereka di tiga lingkaran di bawah ini.



Gambar 1.1. *The Three Circle Model of Family Business*

Sumber : *hbswk.hbs.edu*

Sebuah perusahaan yang di dalamnya terlibat tiga pihak yang berbeda pastilah mengalami benturan masalah dengan berbagai konflik kepentingan. Menurut Davis (2011), untuk mengelola bisnis secara efektif, keluarga dan pemilik membutuhkan komunikasi dan pengambilan keputusan yang jelas lintas pihak keluarga, bisnis, dan pemilik. Perusahaan keluarga swasta perlu *good corporate governance* untuk membentuk mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencegah pertengkaran keluarga dari kerugian bisnis, terutama setelah pendiri telah meninggal dunia atau pensiun (Lipman, 2006).

Dalam situasi global yang penuh persaingan ini perusahaan diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak terkait dalam *family business*. Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian intern dalam perusahaan untuk memastikan perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Keuntungan adanya *good corporate governance* dalam perusahaan keluarga swasta adalah menghindarkan dari dampak buruk dari persaingan antara saudara dan litigasi antara anggota keluarga akibat adanya pandangan yang berbeda berkaitan dengan bisnis (Lipman, 2006).

*Corporate Governance* belakangan ini merupakan hal mutlak yang sebaiknya dimiliki perusahaan. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *good corporate*

*governance* (Daniri, 2005). Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada saat ini juga ditengarai karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Tunggal (2013) mengemukakan tentang fakta skandal – skandal akuntansi dan kecurangan korporasi yang telah menjadi berita utama setiap minggunya selama lebih dari lima tahun terakhir di Amerika Serikat, seperti penyajian kembali \$3,8 miliar laba WorldCom yang dikelembungkan telah mengakibatkan kerugian sebesar \$179,3 miliar bagi para pemegang saham, dan 17.000 orang kehilangan pekerjaannya, kemudian beraneka cara yang digunakan Enron untuk menggelembungkan laba sebesar \$586 juta yang menyebabkan disajikannya kembali laporan keuangan dan bangkrutnya perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan investor mengalami kerugian sebesar \$66,4 miliar dan 6.100 orang kehilangan pekerjaan, begitu pula dengan Xerox Corp. yang mengecoh investor dengan menyajikan kembali laba selama lima tahun untuk mengklasifikasi ulang pendapatan senilai lebih dari \$6 miliar. Kasus – kasus yang melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan tidak diterapkannya prinsip - prinsip *good corporate governance*. Sejumlah usulan untuk memperbaiki praktik bisnis dan pengawasan akuntansi bermuncula dari badan – badan pemerintah dan penyelenggara regulasi, masyarakat investasi, dan profesi akuntansi. Maka disusun sebuah undang – undang baru yang akan mengatur perilaku bisnis dan juga praktik – praktik akuntansi dan audit. *Sarbanes – Oxley Act*, yang disahkan menjadi undang – undang pada bulan Juli tahun 2002 oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memerangi kecurangan dan mengekang praktik – praktik akuntansi yang buruk. Sedangkan di Asia, konsep *good corporate governance* baru relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

THE TOP 100 CORPORATE CRIMINALS OF THE 1990's				
No.	Company	Type of Crime	Criminal Fine	Source
1	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Antitrust	\$500 million	12 Corporate Crime Reporter 21(1), May 24, 1999
2	Daiwa Bank Ltd.	Financial	\$340 million	10 Corporate Crime Reporter 9(3), March 4, 1996
3	BASF Aktiengesellschaft	Antitrust	\$225 million	12 Corporate Crime Reporter 21(1), May 24, 1999
4	SGL Carbon Aktiengesellschaft (SGL AG)	Antitrust	\$135 million	12 Corporate Crime Reporter 19(4), May 10, 1999
5	Exxon Corporation and Exxon Shipping	Environmental	\$125 million	5 Corporate Crime Reporter 11(3), March 18, 1991
6	UCAR International, Inc.	Antitrust	\$110 million	12 Corporate Crime Reporter 15(6), April 13, 1998
7	Archer Daniels Midland	Antitrust	\$100 million	10 Corporate Crime Reporter 40(1), October 21, 1996
8	(tie) Banker's Trust	Financial	\$60 million	12 Corporate Crime Reporter 11(1), March 15, 1999
9	(tie) Sears Bankruptcy Recovery Management Services	Fraud	\$60 million	13 Corporate Crime Reporter 7(1), February 15, 1999
10	Haarman & Reimer Corp.	Antitrust	\$50 million	11 Corporate Crime Reporter 5(4), February 3, 1997

Tabel 1.2. *THE TOP 100 CORPORATE CRIMINALS OF THE 1990's*

Sumber : *Robert AG. Monks, 2004 : 25*

Krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini juga diakibatkan oleh tidak adanya penerapan *corporate governance* yang baik. Menurut Yusuf (2007) di Indonesia kesadaran akan pentingnya *good corporate governance* mulai dirasakan pada saat negara ini dihantam oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menyebabkan perkembangan perekonomian Indonesia mengalami stagnansi bahkan kemunduran. Indonesia mulai menerapkan prinsip *good corporate governance* sejak menandatangani

*Letter of Intent (LOI)* bekerja sama dengan IMF, dimana bagian terpentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan - perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1999 menyatakan bahwa perusahaan - perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar *good corporate governance* yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walaupun menyadari pentingnya *good corporate governance*, banyak didapati masih rendahnya kesadaran perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut.

Melihat kecurangan yang terjadi baik sampai di dunia bisnis internasional tersebut membuat para praktisi dalam negeri sadar bahwa dibutuhkan adanya upaya pencegahan kecurangan dalam perusahaan. Menurut Tunggal (2010), pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan sebelas cara, di mana tiga di antaranya adalah membangun struktur pengendalian intern yang baik, mengefektifkan aktifitas pengendalian dan meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Pengendalian internal mempunyai pengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2002) merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran - ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian yang keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Pengendalian intern merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup akan tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan pengendalian intern adalah untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori sebagai berikut: (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi dari operasional, (3) ketaatan pada hukum dan peraturan. Walaupun terdapat perbedaan pengendalian intern yang diterapkan pada masing- masing perusahaan, tetapi unsur- unsur yang mendasarinya harus sama (Mulyadi, 2002).

Dengan adanya pengendalian intern seperti ini maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain, hal ini dapat

mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap mekanisme *good corporate governance*. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Elbannan (2008) yang hasilnya menunjukkan bahwa pengendalian internal menyebabkan *corporate governance* yang kuat.

*Form of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) tahun 2001 mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak – hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut FCGI tahun 2006, prinsip yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* yaitu *fairness, disclosure and transparency, accountability, responsibility, dan independency*.

Industri keramik di Indonesia tumbuh mengesankan setelah bangkit dari krisis dan terus berkembang (Ririn, Kompas 2012). Menurut MS Hidayat selaku Menteri Perindustrian dalam kompas.com, perkembangan produk keramik *tile* memberi hasil cemerlang sehingga berada pada peringkat 6 setelah China, India, Italia, Brasil, dan Spanyol. Tak hanya itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Achmad Wijaja dalam kompas.com mengatakan bahwa di tengah beragam keterbatasan, industri keramik mampu menyumbang 3 % terhadap perekonomian nasional. Selain memberikan sumbangan besar, industri keramik juga memberi sumbangan penyerapan tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

PT. Platinum Ceramics Industry (PCI) pada mulanya bernama PT. Asia Victory Industry Ltd. dan berdiri pada 1971 sebagai perusahaan keluarga yang bergerak di industri tegel keramik di Surabaya, Jawa Timur. Sudah lebih dari 35 tahun perusahaan ini berkembang menjadi pemain utama dalam industri keramik di Indonesia dan termasuk dalam produsen keramik terbesar di Indonesia. Selama ini, PT. Platinum Ceramics Industry terus berfokus pada desain dan produksi keramik dinding, keramik lantai, dan keramik dekoratif dalam berbagai ragam ukuran dan aplikasi. Perusahaan ini memiliki tenaga kerja total kurang lebih 3.500

orang. Di samping melayani kebutuhan pasar domestik, PCI juga melakukan ekspor. Dari total produksi PCI, 85% untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, dan 15% untuk diekspor. Pada 2008 perusahaan ini mendapatkan standar mutu ISO 9001.

Penelitian ini penting dan menarik untuk dilakukan karena PT. Platinum Ceramics Industry adalah perusahaan keluarga yang bergerak pada sektor yang sedang berkembang, di mana harus fleksibel mengikuti perkembangan dan dengan itu dibutuhkan adanya sistem pengendalian internal yang mendukung implementasi prinsip – prinsip *good corporate governance* agar perusahaan tetap bertahan di tengah perkembangan yang ada.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimana sistem pengendalian internal pada PT. Platinum Ceramics Industry?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT. Platinum Ceramics Industry?
- 1.2.3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap implementasi prinsip – prinsip *good corporate governance* pada PT. Platinum Ceramics Industry?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Mengetahui sistem pengendalian internal pada PT. Platinum Ceramics Industry.
- 1.3.2. Mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada PT. Platinum Ceramics Industry.
- 1.3.3. Mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap implementasi prinsip – prinsip *good corporate governance* pada PT. Platinum Ceramics Industry.

#### **1.4. Batasan Penelitian**

Batasan penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Penelitian dilakukan pada objek penelitian yaitu PT. Platinum Ceramics Industry.
- 1.4.2. Penelitian ini membahas sistem pengendalian internal dalam batasan unsur – unsur pengendalian internal.
- 1.4.3. Penelitian ini hanya membahas pengaruh sistem pengendalian internal terkait hubungannya dengan implementasi prinsip – prinsip *good corporate governance* dalam lingkup penerapannya dalam perusahaan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1.5.1. Bagi Penulis

- 1.5.1.1. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian internal dalam perusahaan keluarga.
- 1.5.1.2. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada perusahaan keluarga.
- 1.5.1.3. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap implementasi prinsip - prinsip *good corporate governance* pada perusahaan keluarga.
- 1.5.1.4. Penulis dapat mencocokkan hasil penelitian dengan teori yang telah dipelajari dalam masa perkuliahan

##### 1.5.2. Bagi Perusahaan

- 1.5.2.1. Membantu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana sistem pengendalian internal pada perusahaan.
- 1.5.2.2. Membantu perusahaan untuk mengetahui implementasi prinsip - prinsip *good corporate governance* pada perusahaan sampai saat ini.

1.5.2.3. Memberi saran kepada perusahaan terkait dengan sistem pengendalian internal dan implementasi prinsip – prinsip *good corporate governance*.

1.5.3. Bagi Ilmu Pengetahuan

1.5.3.1. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan juga dapat memperluas ilmu pengetahuan yang terkait dengan sistem pengendalian internal.

1.5.3.2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan juga dapat memperluas ilmu pengetahuan yang terkait dengan *corporate governance*.

1.5.3.2. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai cara pengelolaan perusahaan keluarga yang baik.